

Editor:
Ridwan al-Makassary & Yusuf Daud



Menyalakan “Lilin” Dialog Antar Agama

KAICIID
CIID
DIALOGUE
CENTRE
KFN INDONESIA

KAICIID
CIID
DIALOGUE
CENTRE

litera

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)
MENYALAKAN “LILIN”: DIALOG ANTAR AGAMA

Copyright © **KFN Indonesia**

Diterbitkan pertama kali oleh Litera.

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang *All Rights Reserved*.

Hak Penerbitan pada Penerbit *Litera*.

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit

Cetakan Pertama: April 2020
xxviii+180 hlm, 15 cm x 22 cm
ISBN: 978-623-7864-04-2

Editor : Ridwan al-Makassary & Yusuf Daud
Perancang Sampul : Agung
Penata Letak : Litera.co

Diterbitkan oleh:

Penerbit

litera

Suronatan NG II/863 Yogyakarta

Telp. 0852-2633-0202

E-mail : kotak.litera@gmail.com

Bekerjasama dengan:

KAICIID Fellows Network (KFN) Indonesia

DAFTAR ISI

Kata Sambutan Rektor UIN Alauddin Makassar <i>Prof. Hamdan Juhanis, MA, Ph.D</i>	v
Sekapur Sirih Lurah KFN Indonesia <i>Yusuf Daud</i>	ix
Catatan Pengantar Koordinator Program <i>Ridwan al-Makassary</i>	xiii
Daftar Isi.....	xxiii

Bab Satu

Perjumpaan Membasuh “Luka”

Perjumpaan Meretas Stigma Negatif Antar Agama <i>Muhammad Iqbal Arsyad</i>	2
Berharap pada Kekuasaan: Konflik <i>Sunni-Syiah</i> di Sampang Madura <i>Akhmad Siddiq</i>	9
Damai itu Mungkin Kalau Luka Batin Dipulihkan <i>Siswanto</i>	14
Peace Train Indonesia: Ruang Perjumpaan dan Dialog Generasi Muda Lintas Agama <i>Ahmad Nurcholish</i>	19
Membumikan Dialog Lintas Iman; Menepis Stigma, Merangkai Asa <i>Syamsul Arif Galib</i>	26

BERHARAP PADA KEKUASAAN: KONFLIK *SUNNI-SYIAH* DI SAMPANG MADURA

Akhmad Siddiq²

Sepulang dari mengikuti program *Mindanao Peacebuilding Institute* (MPI) *Annual Peacebuilding Training* 2013 di Davao, kami—saya dan empat orang lainnya dari *Universitas Islam Negeri* (UIN) *Sunan Ampel* Surabaya—membentuk sebuah pusat studi dan advokasi bernama *Center for Peace-Building* (CPB). Pekerjaan pertama dan utama kami saat itu adalah konflik *Sunni-Syiah* di Sampang. Kami bekerja sebagai tim “pencari data” untuk membantu proses rekonsiliasi, memperbaiki hubungan retak antar komunitas *Sunni* dan *Syiah* di Sampang, sekaligus mendampingi proses pemulangan kembali para pengungsi *Syiah* dari Rusunawa Puspa Agro, Sidoarjo, ke kampung halaman.

Untuk itu kami melakukan banyak hal: mulai dari observasi ke lapangan, bertemu dengan para kiai dan tokoh lokal di Sampang, menemui pengungsi *Syiah* di Jemundo, melakukan *Focus Group Discussion* (FGD) bersama kiai-kiai di Madura, melakukan pendampingan bagi anak-anak usia sekolah di pengungsian, membuat forum pertemuan bersama pihak-pihak terkait, hingga membuat laporan kerja untuk menjadi acuan penanganan konflik dan langkah-langkah pemulangan pengungsi. Kami bekerja secara intensif selama kurang lebih tiga tahun, hingga akhir 2015. Setelah

² Penulis adalah alumni *Mindanao Peacebuilding Institute* (MPI) 2013 dan salah satu penggagas *Center for Peacebuilding* (CPB) UIN *Sunan Ampel* Surabaya

itu, kami lebih banyak mengamati.

Hingga saat ini, sebagian orang mungkin menganggap konflik itu sudah selesai, sebagian lain sudah mulai melupakannya, dan sebagian lain sengaja mengulur waktu agar konflik tersebut benar-benar terlupakan. Di luar itu semua, yang harus dicatat adalah kenyataan bahwa pengungsi *Syiah* di Jemundo sampai sekarang masih tertahan dan tidak bisa pulang ke kampung halaman. Mereka terpisah dari kerabat dan saudara, dari rumah yang sebagian besar dibakar, dari ladang dan tanah pertanian, dari ternak dan peliharaan, dan dari banyak hal lain yang mungkin serupa kenangan.

Dalam catatan pendek ini, saya ingin menceritakan beberapa bagian dari proses yang telah kami lakukan dan berbagi catatan lapangan.

Sebagai langkah awal, kami melakukan pertemuan dengan pihak-pihak yang terkait: Basra (*Badan Silaturahmi Ulama Madura*) sebagai perwakilan ulama *Sunni* di Madura, perwakilan pengungsi *Syiah* di Jemundo, ABI (*Ahlu Bait Indonesia*) dan IJABI sebagai representasi *Syiah*, serta pemerintah tingkat provinsi dan kabupaten (Sampang). Pertemuan tersebut difasilitasi oleh Rektor UIN *Sunan Ampel* Surabaya sebagai salah satu ketua tim rekonsiliasi. Kami ingin mengetahui lebih jauh apa sebenarnya kebutuhan (*needs*) dan keinginan (*interests*) pihak-pihak yang terlibat konflik, untuk kemudian mencari titik temu (*unifying factor*). Tentu saja tidak mudah, karena masing-masing pihak cenderung bersikukuh dengan posisi dan keyakinannya sendiri. Titik temu dan kompromi-kompromi yang mungkin bisa disepakati tampak seperti mukjizat yang mustahil diharapkan. Usulan, rekomendasi dan draf penyelesaian konflik yang kami susun tidak bertaji.

Pada saat itu, kami berupaya untuk mencari jalan damai yang berpijak pada nilai-nilai budaya (*cultural values*) dan kearifan lokal (*local wisdom*), dengan cara merangkul kiai-kiai lokal. Kami juga

mengupayakan FGD atau lokakarya kecil untuk menumbuhkan pengertian yang utuh tentang bagaimana menyikapi keragaman dan keberagaman. Cara seperti ini butuh waktu lama, tapi daya tangkalnya kami meyakini mampu berdampak lama (*long-lasting effect*). Opsi memulangkan para pengungsi menggunakan kekuatan militer dan kekuasaan pemerintah (*military and governmental power*) juga muncul, tapi rekomendasi seperti ini tak mudah dan tak kunjung terlaksana karena berbagai alasan: salah satunya adalah kekhawatiran dan ketakutan akan munculnya gesekan dan konflik yang lebih besar di masa depan.

Kerumitan mencari jalan keluar dalam mewujudkan rekonsiliasi tidak lepas dari rumitnya mengurai akar masalah. Sebagian orang melihat konflik tersebut dari akar teologi dan perbedaan akidah, sebagian menariknya ke arah relasi kuasa antar kiai lokal, sebagian menyebutnya sebagai bagian dari percaturan politik regional, sebagian menganalisis dari sudut pandang kemiskinan dan keterbelakangan sosial, dan bahkan sebagian lain menautkannya dengan konflik Saudi-Iran di aras internasional.

Suatu waktu kami menemui seorang kiai di Batu Ampar, Pamekasan. Namanya Kiai Daman, tokoh lokal sekaligus saudara dekat Kiai Tajul Muluk. Dia menjelaskan bahwa persoalan *Sunni-Syiah* di Sampang bukan semata persoalan akidah, bukan semata teologis. Ada banyak hal lain yang mengitari konflik tersebut, dan utamanya terletak pada komunikasi sosial. Sebagai seorang kiai muda, Tajul Muluk dianggap memiliki daya kritisisme yang segar. Dia mempertanyakan banyak hal, termasuk elemen-elemen tradisi yang selama ini dirawat oleh kiai-kiai lokal. Dalam konteks ini, komunikasi menjadi penting untuk mempertemukan dua kutub yang terlihat berbenturan: di satu sisi ada kubu *Syiah* yang diwakili Tajul Muluk, di sisi lain ada kubu *Sunni* yang direpresentasikan oleh kiai-kiai lokal tradisional.

Menurut Kiai Daman, ketika Tajul Muluk menyentuh simpul tradisionalisme Islam lokal dan melancarkan kritik terhadap beberapa hal tradisional, contoh spesifiknya adalah kritik terhadap ritual perayaan *Maulid* dari rumah ke rumah, sebagian orang melihatnya sebagai seorang *agent* yang berupaya meruntuhkan praktik-praktik primordialisme. Tajul Muluk terlihat sedang mengusik keamanan sosial, budaya, ekonomi, dan juga politik. Pendekatan Tajul dianggap terlalu ofensif.

Terkait dengan persoalan ini, seorang kiai yang mengasuh pesantren tidak jauh dari kediaman Tajul Muluk menyampaikan bahwa ada poin kesantunan dan kesopanan dalam berkomunikasi yang diabaikan oleh Kiai Tajul Muluk. Kritik-kritik itu dilontarkan Kiai Tajul di ruang-ruang publik, melalui pengajian umum di masjid. Hal itulah yang kemudian menimbulkan keresahan di masyarakat. Di sisi lain, Tajul Muluk dan para pengikutnya menjelaskan diri sebagai korban, kelompok yang dizalimi, kelompok yang mendapatkan perlakuan tidak baik dari saudara mayoritas mereka, Muslim *Sunni*. Tajul Muluk adalah pahlawan bagi para pengikutnya, tetapi juga ancaman bagi para penentangannya.

Sayangnya, kata Kiai Daman, Tajul Muluk tidak memiliki modal primordial yang cukup. Ia bukanlah kiai besar yang mengasuh pesantren besar. Dia juga bukan keturunan kiai besar dari *trah* keluarga terpandang. Ia juga tidak menjalin hubungan (menikah) dengan keluarga pesantren besar. Padahal, di Madura, modal primordial menjadi penting: karena dengan begitu ia akan memiliki benteng yang tak mudah diserang, sekalipun ia melahirkan kontroversi dan dianggap menebar keresahan.

Dalam rentang waktu yang tidak sebentar mengikuti proses rekonsiliasi *Sunni-Syiah* di Sampang, saya melihat bahwa masih banyak orang dan kelompok yang menjadikan keyakinan (agama) sebagai sumbu ledak untuk merawat dan menumbuhkan konflik.

Di sini, konsepsi Hasenclever dan Rittberger (2000) mengenai hubungan agama dan konflik dalam bentuknya yang *primordialis*, *instrumentalis*, dan *konstruktivis* masih sangat relevan untuk dikaji lebih dalam. Kata kunci lain adalah *political will* dari pemerintah. Tanpa adanya kebijakan yang memihak terhadap realisasi dan percepatan penanganan konflik, proses rekonsiliasi hanya akan menjadi ritual tanpa makna, rangkaian kegiatan tanpa kejelasan di ujungnya. Negara sebagai sebuah kekuasaan yang otoritatif harus hadir. Dalam catatan saya, konflik sosial seperti *Sunni-Syiah* di Sampang terjadi disebabkan salah satunya oleh adanya kontestasi dan perebutan relasi kuasa di tingkat elit lokal. *Nah*, konflik kekuasaan di ruang lingkup yang kecil ini memerlukan kebijakan tegas dari kekuasaan yang lebih besar di atasnya, bernama negara.